



**PERSYARATAN EVALUASI KUALIFIKASI SISA KEMAMPUAN PAKET
UNTUK USAHA NON KECIL PADA DOKUMEN PEMILIHAN TENDER
PEKERJAAN KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN
USAHA YANG SEHAT**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :
Dandy Ilham Raharjo
NIM. 2220119003

Pembimbing :
Dr. Yuslim, S.H., M.H.
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

Persyaratan Evaluasi Kualifikasi Sisa Kemampuan Paket Untuk Usaha Non Kecil Pada Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat

Oleh : Dandy Ilham Raharjo (2220119007)

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilihan tender pekerjaan konstruksi memiliki 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa yang akan mengikuti proses Tender dengan upload Dokumen Penawaran yakni syarat administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga hal ini diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Salah satu syarat evaluasi kualifikasi adalah Sisa Kemampuan Paket (SKP) usaha non kecil. Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi memiliki 2 (dua) cara untuk menentukan SKP tersebut yakni untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait terkait persyaratan SKP usaha non kecil untuk tender pekerjaan konstruksi. Metode dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif yang bertujuan untuk untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku yang menggunakan pendekatan perundang – undangan. memahami penerapan dengan adanya persyaratan SKP kualifikasi usaha non kecil ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan juga terkait apakah penerapan persyaratan SKP usaha non kecil ini sudah efektif untuk diterapkan sebagai salah satu persyaratan tender pekerjaan konstruksi. Berdasarkan hasil penelitian : Pertama, persyaratan evaluasi kualifikasi SKP usaha non kecil untuk pekerjaan konstruksi memiliki 2 (dua) cara yakni dengan rumusan $SKP = KP - P$ (jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan) penjelasan dalam KP = nilai Kemampuan Paket pekerjaan, dengan ketentuan: untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N, kepastian hukum dari penjelasan tentang tata cara penghitungan SKP belum diatur secara detail untuk hasil dari 1,2 (satu koma dua) N. Kedua, Persyaratan evaluasi kualifikasi SKP usaha non kecil untuk tender pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaanya dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yakni persekongkolan dengan cara pinjam perusahaan, dengan adanya 2 (dua) ketentuan yang berbeda untuk pelaku usaha. Ketiga, persyaratan SKP usaha non kecil dari segi kepastian hukum belum tercapai, karena harus ada keserasian ketentuan SKP usaha non kecil dengan dibuatnya suatu sistem terpadu untuk memeriksa kebenaran dari data kualifikasi pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh peserta tender tersebut benar.

Kata kunci : Persyaratan Sisa Kemampuan Paket, Persaingan Usaha, Tender Pekerjaan Konstruksi

**Requirements for Qualification Evaluation of Remaining Capability
Packages for Non-Small Businesses in Construction Work Tender Selection
Documents in View of Fair Business Competition Law**

By : Dandy Ilham Raharjo (2220119003)

ABSTRACT

The implementation of the tender selection for construction work has 4 (four) requirements that must be fulfilled by Service Providers who will take part in the Tender process by uploading Bid Documents, namely administrative, qualification, technical and price requirements, this is regulated in the Government Procurement of Goods and Services Policy Agency Regulation Number 12 of the Year 2021. One of the qualification evaluation requirements is the Remaining Capability Package (SKP) for non-small businesses. The Selection Working Group in conducting evaluations has 2 (two) ways to determine the SKP, namely for non-small businesses, the Package Capability (KP) value is determined as 6 (six) or 1.2 (one point two) N. This causes injustice and gives rise to legal uncertainty regarding non-small business SKP requirements for construction work tenders. The method in writing this thesis is normative juridical which aims to test an applicable norm or provision using a statutory approach. understand that the implementation of the SKP requirements for non-small business qualifications is in accordance with existing provisions and also regarding whether the application of the SKP requirements for non-small businesses is effective in being implemented as one of the tender requirements for construction work. Based on the research results: First, the SKP qualification evaluation requirements for non-small businesses for construction work have 2 (two) ways, namely by formulating $SKP = KP - P$ (number of construction work packages being worked on) the explanation is $KP =$ work package capability value, with the provisions : for non-small businesses, the Package Capability (KP) value is determined as 6 (six) or 1.2 (one point two) N, legal certainty from the explanation of the procedures for calculating SKP has not been regulated in detail for a result of 1.2 (one point two) N. Second, the requirements for evaluating SKP qualifications for non-small businesses for tenders for construction work in their implementation can give rise to unhealthy business competition, namely collusion by borrowing from companies, with the existence of 2 (two) different provisions for business actors. Third, the SKP requirements for non-small businesses in terms of legal certainty have not been achieved, because there must be harmony with the SKP provisions for non-small businesses with the creation of an integrated system to check the correctness of the qualification data for the work being carried out by the tender participants.

Keywords : Requirements for Remaining Package Capabilities, Business Competition, Construction Work Tenders